

## **Aliran Informasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia dalam Mensosialisasikan RUU Perlindungan PRT**

*Information Flow of Tunas Mulia Domestic Workers Union in  
Disseminating the Domestic Worker Protection Bill*

**Anugerah Ayu Sendari<sup>1</sup>, Rosalia Prismarini Nurdiarti<sup>2</sup>**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta<sup>1,2</sup>

Email : rosanrdrt@gmail.com

### **Abstrak**

Serikat pekerja rumah tangga (SPRT) berperan sebagai wadah komunikasi para pekerja rumah tangga (PRT). Serangkaian proses pertukaran informasi terkait PRT berlangsung di serikat ini. Salah satu informasi penting di serikat PRT adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sosialisasi RUU PPRT diperlukan untuk mendukung pengesahan RUU ini menjadi sebuah undang-undang yang masih tersendat di DPR RI selama 19 tahun. Dalam proses ini terdapat aliran informasi yang membuat sosialisasi RUU PPRT bisa menjangkau seluruh PRT. Aliran informasi inilah yang terdapat di SPRT Tunas Mulia Yogyakarta. Penelitian ini secara deskriptif kualitatif mengurai bagaimana dan seperti apa aliran informasi di serikat pekerja tersebut dalam mensosialisasikan sebuah RUU. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menyajikan data deskriptif yang mendetail dan dapat membantu situasi sosialisasi RUU PPRT secara menyeluruh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi organisasi yang di dalamnya membahas tentang aliran informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aliran informasi (penyebaran pesan, pola, dan arah) dalam serikat PRT ketika mensosialisasikan RUU PPRT. Penyebaran pesan terjadi secara serentak dan berurutan. Pola aliran informasi yang ditemukan adalah pola lingkaran, dan arah aliran informasi adalah formal (horizontal dan vertikal) serta informal. SPRT Tunas Mulia sudah melakukan serangkaian pendekatan komunikasi untuk mensosialisasikan RUU PPRT. Sosialisasi ini dilakukan agar PRT maupun masyarakat memiliki satu pemahaman tentang urgensi pengesahan RUU PPRT.

## Kata kunci: Aliran informasi, Komunikasi Organisasi, Serikat Pekerja, Pekerja Rumah Tangga

### Abstract

*The domestic workers' union (SPRT) acts as a forum for communication between domestic workers (PRT). A series of information exchange processes related to domestic workers took place in this union. One of the important pieces of information on the domestic worker union is the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT). Socialization of the PPRT Bill is needed to support the ratification of this bill into law which has been stalling in the Indonesian Parliament for 19 years. In this process there is a flow of information that allows the socialization of the Domestic Workers Bill to reach all domestic workers. This flow of information is contained in the SPRT Tunas Mulia Yogyakarta. This descriptive qualitative research reveals how and what kind of information flow in the trade unions is in socializing a bill. The case study approach was used in order to provide detailed descriptive data and to assist the socialization of the PPRT Bill as a whole. The theory used in this research is organizational communication theory which discusses the flow of information. The results of the study show that there is a flow of information (message spread, patterns, and directions) within the domestic workers' union when socializing the Domestic Workers Bill. Dissemination of messages occurs simultaneously and sequentially. The pattern of information flow found is a circular pattern, and the direction of information flow is formal (horizontal and vertical) as well as informal. SPRT Tunas Mulia has taken a series of communication approaches to socialize the PPRT Bill. This socialization was carried out so that domestic workers and the public have an understanding of the urgency of ratifying the PPRT Bill.*

**Keywords:** Information flow, Organizational Communication, Trade Unions, Domestic Work

## PENDAHULUAN

Aliran informasi dalam konteks komunikasi organisasi menjadi bagian yang sangat penting. Aliran informasi organisasi merupakan informasi yang berpindah dari kedudukan yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah jabatannya atau sebaliknya. Aliran informasi ini juga terjadi pada mereka yang tidak berkedudukan sama, atau antar entitas dalam organisasi. secara efektif ketika menyampaikannya. Dalam aliran informasi diperlukan perencanaan dan penyusunan pesan yang tepat, serta saluran yang strategis untuk menyampaikan pesan secara akurat kepada target penerima pesan sehingga mampu mempengaruhi pandangan dan perilaku khalayak yang dituju (Suparna, 2019; Astuti, Itrawan & Arsyad, 2022).

Penelitian tentang aliran komunikasi organisasi, seringkali dihubungkan dengan pola komunikasi organisasi. Seperti penelitian pada PLN area Bandung dalam kegiatan *code of conduct*, ditemukan bahwa komunikasi hanya berlangsung secara horizontal antara bagian fungsional satu ke bagian fungsional yang lain (Murti, Lestari & Ali, 2017). Sementara pada riset tentang pola komunikasi pada pengguna *paperless office*, diketahui bahwa komunikasi dengan aplikasi tersebut

cenderung cair artinya bisa bersifat formal dan informal karena semua pengguna bisa saling berkomentar layaknya menggunakan media sosial (Iskandar, 2020).

Pola aliran komunikasi juga dikaitkan dengan variabel motivasi, hasil riset ini menyatakan bahwa karyawan pada divisi IT di Bilibli.com akan melakukan komunikasi jika memang ada suatu hal yang harus didiskusikan, jadi komunikasi organisasi hanya berpengaruh sekitar 10,3 % terhadap motivasi (Chieristian & Candraningrum, 2018). Penelitian Mahmud dan Swarnawati (2020) menunjukkan bahwa peranan jaringan komunikasi seperti *opinion leader*, *gatekeeper*, *cosmopolites* dan *bridge* memberikan kontribusi pada pola informasi dan komunikasi terkait penyampaian ide, laporan pekerjaan, kedisiplinan dan proses penyelesaian konflik.

Pada konteks penelitian ini komunikasi organisasi dilihat dari proses sosialisasi di Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sosialisasi merupakan upaya masyarakat dalam memberikan pendidikan kepada individu-individu mengenai tata cara berperilaku, pentingnya mematuhi aturan, peran yang harus dijalankan, serta nilai-nilai yang perlu dipegang teguh (Sobur, 2014). RUU-PPRT mengandung ketentuan untuk mengakui status pekerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), memperjuangkan kesejahteraan mereka sebagai pekerja dan warga negara, dan memberikan perlindungan serta menjaga keseimbangan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja (Draf RUU PPRT, 2013). Ini sebabnya, penting mensosialisasikan RUU PPRT ke kelompok PRT itu sendiri.

RUU PPRT mulai diajukan ke DPR RI sejak 2004 silam. RUU PPRT bertujuan menghapuskan perbudakan modern dengan mengakui PRT sebagai pekerja dan mengubah pandangan masyarakat terhadap profesi ini. RUU PPRT telah melalui proses yang panjang sejak tahun 2010 sebelum dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. Mulai dari tahun 2014 hingga 2018, RUU PPRT terhenti di daftar tunggu Prolegnas. Namun, pada tahun 2019, RUU ini akhirnya menjadi prioritas tahunan dalam Prolegnas. Pada Juli 2020, RUU ini dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan menjadi naskah akademik. Pada Agustus 2022, Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk Gugus Tugas RUU PPRT untuk mempercepat pengesahannya.

Presiden Joko Widodo juga mendesak pengesahan RUU ini pada Februari 2023. Kemudian, pada Maret 2023, dalam Sidang Paripurna DPR RI, RUU PPRT disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Setelah disetujui sebagai RUU Inisiatif, Daftar Inventaris Masalah (DIM) akan disiapkan oleh pemerintah untuk dibahas oleh Baleg DPR RI secara resmi. Setelah DIM disetujui oleh Baleg, keputusan

tingkat pertama akan diambil, dan RUU PPRT akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk akhirnya diparipurnakan. Apabila semua pihak sepakat, RUU PPRT akan resmi menjadi Undang-Undang. Namun, proses lagi-lagi mandek dalam pembahasan Baleg.

Hingga 19 tahun berlalu, RUU-PPRT tak kunjung disahkan karena adanya resistensi dari sejumlah pihak. Akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) menjadi kelompok pekerja rentan. Seringkali, PRT bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, seperti jam kerja yang panjang tanpa istirahat atau hari libur, serta minimnya jaminan sosial. Mereka juga menghadapi risiko kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi yang mengintimidasi. Selain itu, PRT juga rentan mengalami diskriminasi, pelecehan, dan dianggap rendah dalam profesi mereka (Konde, 2022). Padahal, PRT merupakan elemen penting dalam skala global yang berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian dunia. Mereka selalu diakui sebagai anggota tenaga kerja yang berperan dalam produktivitas (Komnas Perempuan, 2022).

Dalam memperjuangkan hak-haknya, para pekerja rumah tangga akhirnya membentuk serikat. Serikat ini hadir di sejumlah daerah, mewakili PRT di daerah tertentu. Ada serangkaian proses komunikasi yang dilakukan organisasi ini untuk mengajak para PRT untuk turut berserikat dan memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai pekerja sekaligus warga negara.

Serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta merupakan salah satu serikat PRT yang turut mendukung advokasi hak-hak PRT di Yogyakarta. SPRT Tunas Mulia berdiri pada 27 April 2003 di Yogyakarta dan merupakan serikat PRT pertama yang ada di Indonesia. Gerakan akar rumput SPRT Tunas Mulia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an dari sebuah grup pengajian PRT di Sleman. Pada 1999, kelompok ini mendapat pendampingan dari Yayasan Rumpun Tjut Nyak Dhien di Yogyakarta (RTND) yang berfokus pada isu PRT. Bersama Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) dan LSM lainnya di Yogyakarta, RTND membentuk Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) di tahun yang sama (Muryati, 2017). Setelah SPRT Tunas Mulia berdiri, muncul serikat-serikat PRT lainnya di Indonesia.

Organisasi terbentuk ketika terjadi komunikasi individu di dalamnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama (Morrison, 2013). Begitu pula dengan serikat PRT yang bertujuan memperjuangkan kesejahteraan PRT. Sebagai organisasi, SPRT Tunas Mulia memiliki struktur dan pola komunikasi yang cukup terorganisir. Kegiatan-kegiatan di serikat ini di antaranya adalah perekrutan, sekolah PRT, diskusi, dan advokasi. Salah satu objek yang sering

didiskusikan di serikat adalah RUU Perlindungan PRT. SPRT Tunas Mulia yang merupakan serikat PRT pertama, sering menjadi contoh serikat PRT lain dalam mensosialisasikan RUU PPRT pada anggotanya.

Salah satu penyebab RUU PPRT tak kunjung disahkan adalah isu PRT masih menjadi isu sektoral (VOA Indonesia, 2022). Tak seperti RUU TPKS yang lebih umum dan kemudian menyita atensi publik sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang, RUU PPRT masih belum menjadi agenda bersama. Tak kunjung disahkannya RUU PPRT ini lantas menimbulkan pertanyaan. Seperti apa aliran informasi komunikasi dalam mensosialisasikan RUU PPRT baik pada PRT maupun masyarakat. Adakah hambatan atau kesulitan aliran informasi dalam mensosialisasikan RUU PPRT? Ini karena sosialisasi dan penyebaran informasi sangatlah penting untuk mendiseminasi pentingnya sebuah undang-undang untuk mendukung kerja PRT yang rentan. Serikat PRT menjadi salah satu pihak yang mensosialisasikan RUU PPRT pada PRT itu sendiri.

Serikat pekerja berupaya mengorganisir kelompoknya untuk mengajukan tuntutan terkait kesejahteraan pekerja, seperti peningkatan gaji, pemberian tunjangan, dan perbaikan kondisi kerja lainnya (Cutlip, Center, Bloom, 2013). Serikat PRT memiliki karakteristik serikat pekerja yang unik. Anggota serikat berasal dari pemberi kerja yang berbeda. Saat ini anggota didominasi oleh usia 30-50 tahun yang tidak semuanya bisa mencerna informasi seperti RUU PPRT dengan bahasa yang sangat legal. Ini sebabnya, pengurus serikat berusaha menerjemahkan isi RUU PPRT agar lebih sederhana dan bisa dipahami para PRT. Dengan begitu PRT menjadi lebih paham pentingnya RUU PPRT dan ikut memperjuangkannya.

Kegiatan komunikasi di SPRT Tunas Mulia terlihat dalam kegiatan pengorganisasiannya. Kegiatan pengorganisasian di SPRT Tunas Mulia meliputi perekrutan PRT untuk berserikat. Ini dilakukan dengan mengorganisir PRT dari rumah ke rumah, tempat belanja, sampai sekolah. Kegiatan pengorganisasian juga meliputi pembuatan newsletter, siaran radio, teater, leaflet, dan penggunaan sosial media. Pengorganisasian juga meliputi sosialisasi pada perangkat daerah setempat seperti kades, kadus, RT, dan RW. Dalam pengorganisasian, ada sekolah PRT yang dilakukan di tiap Operata atau komunitas. Sekolah PRT dilakukan secara online dua minggu sekali, dan offline perminggu. Materi yang disampaikan berupa Pendidikan skill seperti kerumahtanggaan, babysitter, dan pramurukti. Selain skill, diberikan juga Pendidikan kritis seperti HAM, hak perempuan, hak pekerja, pengorganisasian, serikat, advokasi, dan paralegal. Dalam sekolah PRT ini, terdapat pula diskusi-diskusi, salah satunya tentang RUU PPRT.

Selain sosialisasi ke dalam (ke anggota) serikat juga melakukan sosialisasi ke luar yakni pada masyarakat luas. Hal ini bertujuan mengenalkan RUU PPRT pada masyarakat secara lebih luas. Serangkaian proses ini menunjukkan adanya pola aliran informasi di serikat ketika mensosialisasikan RUU PPRT. Informasi mengalir dari pengurus, ke anggota, lalu ke sesama anggota lainnya. Aliran informasi adalah sebuah proses yang dinamis di mana pesan-pesan dibuat, disajikan, dan ditafsirkan secara konsisten dan berkelanjutan (Pace, Faules, 2013).

Terdapat tiga poin aliran informasi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Poin ini meliputi penyebaran pesan, pola aliran informasi, dan arah aliran informasi. Dalam penyebaran pesan, ada tiga cara aliran informasi bisa terjadi meliputi serentak, berurutan, atau kombinasi di antara keduanya. Penyebaran pesan secara serentak terjadi ketika semua anggota organisasi menerima informasi dalam waktu bersamaan dengan sasaran luas. Sementara penyebaran pesan secara berurutan berarti penyampaian informasi secara berurutan dalam waktu yang tidak beraturan, dan bisa tiba di tempat dan waktu yang berbeda (Pace, Faules, 2013).

Aliran informasi juga memiliki pola tersendiri. Pola aliran informasi adalah tentang siapa berbicara pada siapa. Pola ini berkembang dari kontak antarpersona yang teratur dan cara rutin penerimaan dan pengiriman pesan. Ada dua pola dasar aliran informasi, pola roda dan pola lingkaran. Pola roda didefinisikan sebagai sebuah pola yang mengalirkan seluruh informasi pada individu di posisi sentral. Di posisi sentral, orang menerima informasi dan kontak yang disediakan anggota lain. Kemudian masalah dipecahkan dengan saran dan persetujuan anggota lainnya. Sementara di pola lingkaran, semua anggota berinteraksi satu sama lain. Tidak ada hirarki dalam pola lingkaran. Tapi, komunikasi hanya melalui pengulangan pesan.

Selain penyebaran pesan dan pola, arah aliran informasi juga menentukan suksesnya penyampaian informasi. Arah aliran informasi merujuk pada cara informasi bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Arah aliran informasi ini mengikuti garis komunikasi yang telah ditetapkan. Penting untuk menjaga agar aliran komunikasi ini berjalan lancar sepanjang hierarki organisasi tanpa ada yang terlewat. Pada dasarnya, ada dua jenis arah aliran informasi, formal dan informal. Aliran informasi formal berlangsung mengikuti jenjang hierarkis. Dalam aliran informasi formal, terbagi pula empat variasi arah informasi. Dari atas ke bawah (dari puncak hingga ke tingkatan bawah), dari bawah ke atas (dari tingkatan bawah menuju puncak), horizontal (antara orang dengan tingkatan yang sama), atau lintas-saluran (menghubungkan berbagai unit atau

departemen). Komunikasi formal sering disebut sebagai komunikasi posisional, sementara komunikasi informal dikenal sebagai komunikasi pribadi. Komunikasi informal ini pada dasarnya tidak memiliki struktur atau sistem yang teratur (Hikmalia & Toni, 2023; Ningtyas, Huda & Syaifudin, 2023).

Penelitian ini melihat bagaimana serikat mengolah informasi seputar RUU PPRT menjadi lebih mudah dipahami seluruh anggota. Informasi yang sudah disederhanakan ini kemudian disebar dan membentuk sebuah aliran informasi. Keterlibatan anggota organisasi juga menjadi bagian penting dalam pola aliran informasi. Anggota yang berpartisipasi aktif dan berkontribusi penuh didalamnya akan memengaruhi keberhasilan komunikasi organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aliran komunikasi yang ada di SPRT Tunas Mulia dalam mensosialisasikan RUU PPRT, baik itu internal maupun eksternal. Seperti apa aliran informasi yang terbentuk ketika mensosialisasikan RUU PPRT? Adakah faktor yang menghambat aliran informasi ketika mensosialisasikan RUU PPRT? Penelitian ini juga akan menjawab apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh serikat untuk mendiseminasi informasi terkait isi RUU PPRT.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas atau kedalaman data (Rachmat Kriyantono, 2010). Merangkum dan menggambarkan kondisi atau fenomena merupakan tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode penelitian deskriptif kualitatif adalah menghasilkan deskripsi fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat (Burhan Bungin, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber data. Data ini digunakan untuk meneliti, menguraikan, serta menjelaskan secara komprehensif sebuah fenomena.

Data dalam penelitian studi kasus bisa sangat kaya dan mendetail. Data ini sulit ditemukan dari desain penelitian yang lebih representatif (Alex Sobur, 2014). Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dipilih karena komunikasi organisasi pada serikat pekerja rumah tangga yang dalam hal ini adalah Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia DIY merupakan bentuk organisasi yang unik.

Serikat pekerja rumah tangga terdiri dari para PRT dengan beragam latar belakang, jenis pekerjaan, dan pemberi kerja yang berbeda. Hal inilah yang membuat sosialisasi RUU PPRT memiliki sejumlah tantangan. Belum disahkannya RUU PPRT menjadi permasalahan tersendiri bagi para PRT di DIY dan juga di daerah-daerah lainnya.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam bersama pengurus SPRT Tunas Mulia dan anggota SPRT Tunas Mulia yang turut mensosialisasikan RUU PPRT. Data sekunder didapatkan dari arsip, media sosial, atau data-data yang dimiliki oleh SPRT Tunas Mulia terkait proses pengorganisasian dalam serikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Organisasi SPRT Tunas Mulia

Secara administratif, SPRT Tunas Mulia dipimpin oleh ketua umum dibantu dengan wakil ketua. Kepengurusan utama di bawahnya adalah sekretaris dan Bendahara. Ketua umum-lah yang seharusnya menjadi pengambil keputusan utama. Namun, dalam pelaksanaannya, ketua sudah tidak lagi turut serta dalam organisasi karena harus berpindah tempat tinggal. Akhirnya, dengan kesepakatan bersama, pengambil keputusan diemban oleh tiga orang sekaligus; wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kepemimpinan ini disebut sebagai kepemimpinan presidium. Presidium berarti kepemimpinan tertinggi yang dipegang oleh lebih dari satu orang. Dalam kepengurusan juga satu orang bisa menjabat dua posisi sekaligus karena keterbatasan pengurus. Alasan tidak adanya anggota yang mau menjadi pengurus adalah kesibukan anggota sebagai PRT yang memiliki jam kerja panjang atau tidak menentu. Ini membuat mereka kesulitan membagi waktu antara bekerja dan berorganisasi.

Dalam mengambil keputusan, ketiga pengurus utama sering bertukar pikiran. Mereka sering mengobrol usai pertemuan langsung, atau lewat pesan WhatsApp. Ketika keputusan diambil, baru salah satu di antara mereka menginformasikannya pada pengurus dan anggota lain. Keputusan SPRT Tunas Mulia diambil dari hasil musyawarah mufakat. Bila tidak didapat hasil dari musyawarah, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atas dasar suara terbanyak. Ketika menjalankan organisasi, pengurus SPRT Tunas Mulia rutin mengadakan rapat pengurus. Rapat ini biasa dilakukan tiap tiga bulan,

enam bulan, dan satu tahun sekali. Berdasarkan AD/ART SPRT Tunas Mulia, rapat pengurus digunakan untuk membahas dan membuat perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pembahasan dan pengesahan anggota baru, pembahasan dan penentuan sanksi-sanksi.

SPRT Tunas Mulia menaungi komunitas-komunitas PRT kecil yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Komunitas ini sering disebut dengan Organisasi Pekerja Rumah Tangga (Operata). Di Operata, pengurus SPRT Tunas Mulia juga masuk untuk memberi materi-materi wawasan dan perkembangan tentang RUU PPRT. Selain di Operata, pengurus juga sering mengunjungi anggota-anggota SPRT Tunas Mulia yang tidak tergabung dalam Operata. Selain bertemu secara langsung, pengurus juga menyebarkan informasi melalui media sosial.

## 2. Kegiatan sosialisasi RUU PPRT

### a. Sosialisasi langsung saat pertemuan

Kegiatan sosialisasi RUU PPRT di SPRT Tunas Mulia yang pertama dilakukan dengan cara menyampaikannya langsung saat pertemuan bulanan di tiap Operata. Informasi yang disampaikan di pertemuan ini adalah terkait dengan perkembangan pengesahan RUU PPRT di DPR-RI. Selain menyampaikan informasi terbaru tentang pengesahan RUU PPRT, pengurus SPRT Tunas Mulia juga rutin me-refresh kembali isi-isi dari RUU PPRT. Salah satu caranya seperti memantik diskusi tentang hak-hak PRT dan pemberi kerja. Pengurus juga sempat membahas pasal demi pasal RUU PPRT. Secara garis besar, anggota paham apa itu RUU PPRT dan pentingnya untuk PRT. Namun, jika diminta menjelaskan secara detil, masih banyak yang belum bisa. Kondisi seperti ini terjadi karena tak semua PRT akan mengingat informasi yang diberikan setelah sosialisasi. Faktor usia, jam kerja panjang, dan waktu berkumpul yang terbatas menjadi hambatan dalam memahami lebih dalam isi RUU PPRT. Meski begitu, ada kesadaran bagi PRT untuk mendukung pengesahan RUU PPRT yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

### b. Sosialisasi secara daring

Karena sosialisasi secara langsung tidak bisa dilakukan setiap hari, SPRT Tunas Mulia kemudian mencari cara baru untuk mensosialisasikan RUU PPRT dan info-info terkait PRT. Salah satu caranya adalah menggunakan media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp. Selain grup

WhatsApp, SRT Tunas Mulia juga mengelola sejumlah media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. SPRT Tunas Mulia memiliki satu ponsel khusus untuk mengoperasikan media sosial ini. Dari saluran-saluran media sosial ini diharapkan bisa membantu menyampaikan informasi pada anggota yang tidak tergabung dalam Operata. Selain bertujuan menginformasikan pada anggota, sosialisasi secara daring juga ditujukan pada masyarakat luas agar mengenal pengakuan PRT sebagai pekerja dan mendukung pengesahan RUU PPRT.

Dalam berkampanye di media sosial, SPRT Tunas Mulia bekerjasama dengan JALA PRT. JALA PRT menaungi organisasi seperti serikat, operata, atau komunitas PRT secara nasional di seluruh Indonesia. JALA PRT-lah yang memasok informasi-informasi seputar PRT termasuk RUU PPRT untuk disebar di tiap organisasi tingkat daerah. Alur informasi dari proses kampanye daring ini dimulai dari informasi yang disusun oleh JALA PRT, dibagikan ke grup kampanye JALA PRT, lalu tiap anggota dari tiap organisasi meneruskannya ke grup organisasi masing-masing, baru kemudian anggota di tiap organisasi ikut membagikan informasi.

c. Kampanye dan advokasi

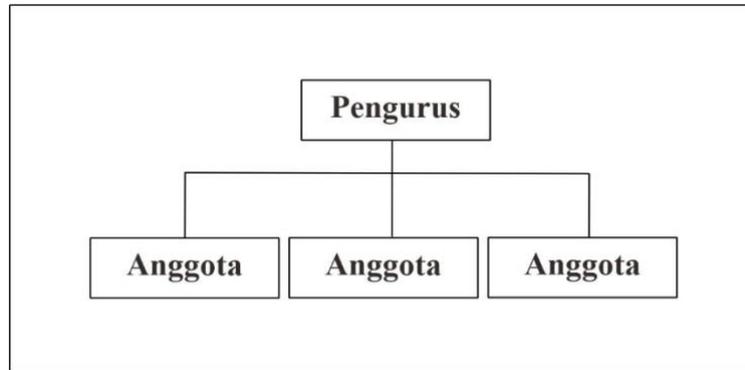
Selain sosialisasi langsung secara luring maupun daring, SPRT Tunas Mulia juga melakukan sosialisasi RUU PPRT melalui kampanye dan advokasi. Kampanye dilakukan untuk memobilisasi kepedulian publik untuk memperoleh dukungan terkait pengakuan PRT sebagai pekerja. Kampanye di SPRT Tunas Mulia adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memengaruhi kebijakan dan praktik, salah satunya di pemerintahan. Dalam hal ini adalah mendesak pengesahan RUU PPRT.

### 3. Aliran informasi di SPRT Tunas Mulia dalam sosialisasi RUU PPRT

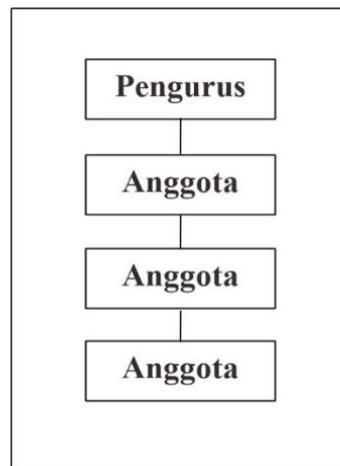
Di SPRT Tunas Mulia, informasi tentang RUU PPRT berhulu dari pengurus SPRT Tunas Mulia lalu ke pengurus Operata yang kemudian diteruskan sampai bermuara ke anggota. Dalam kondisi tertentu, informasi berhulu dari pengurus SPRT Tunas Mulia lalu langsung bermuara ke anggota. Hal ini biasanya terjadi ketika organisasi mengadakan pertemuan rutin langsung yang dihadiri pengurus dan anggota.

a. Penyebaran pesan

Ada tiga cara penyebaran informasi di SPRT Tunas Mulia ketika menyampaikan pesan terkait RUU PPRT. Cara ini meliputi penyebaran pesan secara serentak dan berurutan.



Bagan 1: Penyebaran pesan secara serentak di SPRT Tunas Mulia



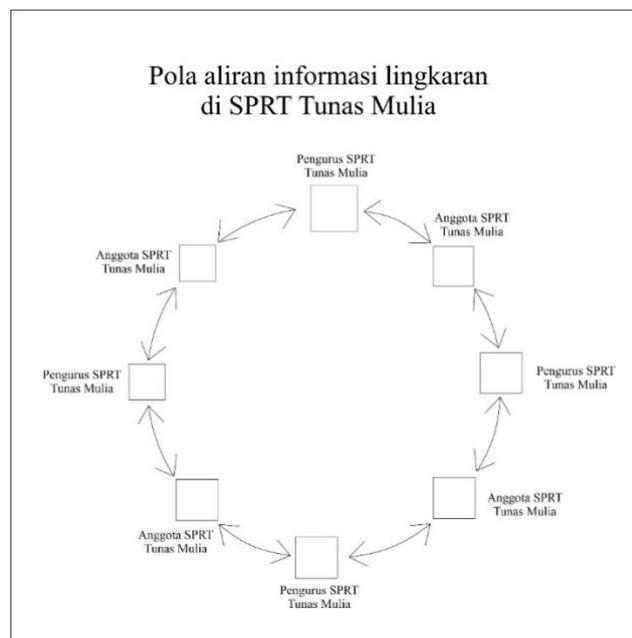
Bagan 2 penyebaran pesan berurutan di SPRT Tunas Mulia

Penyebaran pesan secara serentak dilakukan ketika SPRT Tunas Mulia mengadakan pertemuan langsung seperti pertemuan bulanan di Operata atau rapat rutin yang terjadwal. Pada pertemuan ini, pengurus SPRT Tunas Mulia akan menyampaikan informasi RUU PPRT secara langsung pada anggota. Selain pertemuan langsung, penyebaran secara serentak juga dilakukan secara daring, melalui grup WhatsApp dan media sosial Facebook dan Instagram. Jika ada informasi terkait perkembangan RUU PPRT, maka pengurus akan menyebarkannya melalui grup tersebut. Penyebaran informasi secara daring ini bisa terjadwal namun, ada juga yang insidental. Penyebaran secara terjadwal

biasanya merupakan informasi-informasi yang berasal dari JALA PRT. Sementara penyebaran yang incidental biasanya dari info-info terkini pengurus tentang agenda pertemuan atau rencana kampanye.

Sementara penyebaran pesan secara berurutan dilakukan ketika SPRT Tunas Mulia menyebarkan satu informasi ke salah satu anggota yang kemudian diteruskan ke anggota yang lainnya. Penyebaran ini biasa terjadi pada anggota yang memiliki keterbatasan media komunikasi dan informasi. Misalnya, ketika ada informasi tentang pertemuan bulanan yang akan membahas RUU PPRT. Informasi tersebut biasanya disebarakan melalui grup WhatsApp. Bagi anggota yang tidak memiliki WhatsApp, akan diberi tahu oleh anggota yang memiliki WhatsApp.

b. Pola aliran informasi



Bagan 3 pola aliran informasi RUU PPRT di SPRT Tunas Mulia

Pola aliran informasi yang terbentuk di SPRT Tunas Mulia ketika mensosialisasikan RUU PPRT menyerupai pola lingkaran. Ini karena secara organisasional, kepengurusan dan keanggotaan lebih bersifat setara. Artinya, tiap elemen ikut serta dalam organisasi. Meski dalam hal sosialisasi RUU PPRT, masih ditemukan anggota yang pasif. Namun, tetap ada upaya antar anggota untuk ikut mendukung sosialisasi RUU PPRT. Informasi mengenai RUU PPRT mengalir dari pengurus, lalu ke anggota. Informasi disampaikan pengurus ke anggota saat pertemuan. Kemudian, dari anggota dialirkan lagi ke anggota lain

yang tidak hadir. Aliran informasi dari anggota ke pengurus biasanya terjadi ketika anggota menanyakan tentang RUU PPRT ke pengurus. Atau terjadi ketika adanya diskusi tentang pembahasan isi RUU PPRT, kampanye dukungan, atau rencana aksi pengesahan RUU PPRT. Secara daring, informasi juga dialirkan dari anggota yang mendapat informasi di grup WhatsApp ke anggota yang tidak memiliki WhatsApp.

c. Arah aliran informasi di SPRT Tunas Mulia

Arah aliran informasi ketika SPRT Tunas Mulia menyampaikan informasi tentang RUU PPRT ke anggotanya ada yang bersifat formal dan informal. Arah aliran informasi di SPRT Tunas Mulia sebenarnya bersifat formal karena memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun, karena keterbatasan pengurus aktif, satu pengurus bisa menjabat dua posisi. Akhirnya, hirarkis dalam organisasi ini tidak begitu terlihat.

Ada tiga arah aliran informasi formal SPRT Tunas Mulia, yaitu komunikasi ke bawah, ke atas, dan horizontal. Komunikasi ke bawah terjadi ketika pengurus utama menyampaikan informasi ke hierarkis di bawahnya. Bisa pengurus di bawahnya lalu ke anggota. Komunikasi ke atas terjadi ketika anggota menginformasikan pesan ke pengurus SPRT Tunas Mulia. Informasi ini biasanya berupa pertanyaan seputar RUU PPRT. Komunikasi horizontal secara umum di SPRT Tunas Mulia berlangsung dari satu anggota ke anggota lainnya. Komunikasi horizontal lebih terlihat pada sesama pengurus. Pengurus ini sering berdiskusi bersama untuk membahas cara sosialisasi yang efektif tentang RUU PPRT ke anggota.

Sementara arah aliran informasi informal lebih bersifat pribadi. Dalam komunikasi ini, tidak ada hirarkis antara pengurus dan anggota. Aliran informasi informal biasanya terjadi di dalam forum ketika pertemuan dan melakukan obrolan-obrolan santai. Hal ini terlihat dalam observasi di tiap pertemuan Operata. Semua bisa saling berkomunikasi santai tanpa melihat jabatan.

## KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia Yogyakarta menemukan serangkaian aliran informasi komunikasi organisasi di dalamnya. Aliran informasi ini terlihat ketika mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Terdapat bentuk penyebaran pesan, pola, dan arah aliran informasi yang jelas dalam proses sosialisasi ini.

Ditemukan pula hambatan-hambatan dalam aliran informasi seperti masih ada banyak anggota yang belum memahami RUU PPRT secara mendetail. Faktor-faktor seperti usia, jam kerja panjang, dan keterbatasan waktu berkumpul juga menjadi hambatan dalam pemahaman yang lebih mendalam.

Meski masih mengalami sejumlah hambatan komunikasi, SPRT Tunas Mulia terus berupaya menyebarkan informasi seputar RUU PPRT. Dengan pendekatan yang beragam, baik melalui pertemuan langsung, media sosial, maupun kampanye dan advokasi, SPRT Tunas Mulia berupaya untuk menyebarkan informasi tentang RUU PPRT, memperoleh dukungan publik, dan meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak PRT. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengeksplorasi komunikasi yang terjadi para PRT dalam berorganisasi. Dengan begitu, penelitian bisa membantu memecahkan masalah dalam proses komunikasi dalam organisasi PRT.

## REFERENSI

- Astuti, D, I., Itrawan, B., Arsyad, A, W., (2022). Pola Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Kecamatan Long Itam Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilkom Fisip Unmul.* 10(2), 52-66.  
[https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/03/skl\\_ilkom\\_ejournal\\_dwi\\_indah\\_2014%20\(03-14-22-04-22-17\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/03/skl_ilkom_ejournal_dwi_indah_2014%20(03-14-22-04-22-17).pdf)
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial.* Jakarta.Prenada Media Group.
- Chieristian, G., Candraningrum, D, A. (2018). Pengaruh Pola Aliran Komunikasi Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada IT di Bilibli.com). 2(2). 365-371.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/3908/2294>
- Cutlip, Center, Bloom. 2013. *Effective Public Relations.* Jakarta. Kencana Prenada Group.
- Hikmalia, W., Toni, A. (2023). Menciptakan Iklim Harmonisaasi Komunikasi Organisasi Untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai Administrasi. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi.* 6(1). 98-107  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/JEP/article/view/4465>
- Iskandar, T, P. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Pengguna *Paperless Office* Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Linimasa.* 3(1). 81-100.  
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/2187>

- Komnas Perempuan. (2022). *Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga: Perspektif Agama dan Sosial Budaya*. Jakarta. Komnas Perempuan.
- Konde. 2022. Riset Konde.co: *PRT Dianggap Unskilled Labour Dan Alami Penindasan Berulang*. URL: <https://www.konde.co/2022/06/riset-konde-co-prt-dianggap-unskilled-labour-dan-alami-penindasan-berulang.html/> diakses 23 Oktober 2022
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta. Kencana Prenada Group.
- Mahmud, D., Swarnawati, A. (2020). Pola Jaringan Komunikasi Organisasi Pada Havara Organizer PT. Havara Ruhama Ramadhani di Tangerang Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*. 4(1). 50-60. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/8487>
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Murti, R. A. M., Lestari, M. T., Ali, D. S. F. (2017). Komunikasi Organisasi PT> PLN (Persero) Aarea Bandung Dalam Kegiatan *Code of Conduct*. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 5(2). 210-221. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/8487>
- Muryati. 2017. *Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta dan Tantangannya*. Jurnal Perempuan edisi 94 tahun 2017
- Ningtyas, V.A, Huda, M., & Syaifudin, A.A. (2022). Pola Komunikasi Organisasi Terhadap Produktivitas Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19. *JUSTICE*. 1(1), 11-30 <https://jfisip.uniss.ac.id/index.php/journals/article/view/9>
- Pace dan Paules. 2013. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung. Rosda.
- Sobur, Alex.2014. *Ensiklopedia Komunikasi: P-Z*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Suparna, P., (2019). Aliran Informasi dan Gaya Kepemimpinan Pada Dinas Arsip dan perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 3(2). 173-188. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2178/558/4512>
- Voa Indonesia. 2022. *Progres RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dinilai Lambat*. URL: <https://www.voaindonesia.com/a/progres-ruu->

[perlindungan-pekerja-rumah-tangga-dinilai-lambat-/6603928.html](#)  
diakses 23 Oktober 2022